
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BADUNG
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BADUNG
2021



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BADUNG 2021

ISSN : 2087-6440
No. Publikasi : 51030.2202
Katalog BPS : 4102002.5103
Ukuran Buku : 14.8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 54 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Badung

Penyunting:

BPS Kabupaten Badung

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Badung

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Badung

Dicetak oleh:

CV. Bhinneka Karya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BADUNG 2021

Penanggung Jawab Umum

Dr. Yudi Agusta, M.Sc

Editor

Ayu Manik Pratiwi, SST, M.Si.

Penulis

Luh Putu Yuni Suastini, B.St
Desy Natalia Sasongko, S.Tr.Stat

Desain Tata Letak

Luh Putu Yuni Suastini, B.St

Desain Gambar Kulit

Luh Putu Yuni Suastini, B.St

KATA PENGANTAR

Dalam era pembangunan sekarang ini, data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengambil sebuah kebijakan. Kegiatan perencanaan, pengendalian maupun evaluasi tidak akan berhasil tanpa menggunakan data. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2021 ini merupakan publikasi yang menyajikan indikator pembangunan manusia di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan komponen pembentuk IPM sebagai cerminan beberapa aspek pembangunan manusia di Kabupaten Badung.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati demikian, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemerhati data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Mangupura, Juni 2022
Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Kepala,



Dr. Yudi Agusta, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODOLOGI.....	9
BAB III ANALISIS KOMPONEN PEMBENTUK IPM	19
BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN IPM	35
BAB V PENUTUP	43
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Perbandingan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru	15
TABEL 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum Penghitungan IPM Metode Baru	16
TABEL 3.1	Indikator Penunjang Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020-2021	25
TABEL 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2021 (persen).....	28
TABEL 3.3	Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Tahun 2020-2021	34
TABEL 4.1	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 dan 2021.....	40

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Perkembangan Metodologi Penghitungan IPM	14
GAMBAR 3.1	Umur Harapan Hidup di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	22
GAMBAR 3.2	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021.....	23
GAMBAR 3.3	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Tahun)	28
GAMBAR 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Tahun)	30
GAMBAR 3.5	Paritas Daya Beli Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah per Kapita Setahun)	32
GAMBAR 4.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	38
GAMBAR 4.2	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 202	39
GAMBAR 4.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Indonesia Tahun 2021	43

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	49
LAMPIRAN 2	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	50
LAMPIRAN 3	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	51
LAMPIRAN 4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	52
LAMPIRAN 5	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	53



Bab I

PENDAHULUAN

<https://balengka.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka dalam *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, tingkat nasional maupun tingkat daerah yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan.

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup aspek fisik biologis, aspek

intelektualitas, dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi aspek iman dan ketaqwaan juga mendapat perhatian yang sama besar.

Pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat seperti buta huruf, ketahanan pangan, serta kesehatan tersebut dapat teratasi. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ukuran standar pembangunan manusia di dunia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Sejalan dengan pembangunan manusia Indonesia yang tercantum dalam program Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada pembangunan manusia yang unggul, Kabupaten Badung dalam visi misinya juga menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan di wilayahnya. Program pembangunan manusia di Kabupaten Badung tercantum dalam salah satu misi pemerintahan daerah yaitu memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah. Hal ini penting dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri Kabupaten Badung memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup melimpah, populasi penduduk terbesar ketiga di wilayah Provinsi Bali. Adanya pembangunan manusia yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi modal bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Badung.

Terkait dengan pembangunan manusia, dibutuhkan data yang representatif yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu penerbitan publikasi Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Badung 2021 dipandang perlu sebagai salah satu sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Badung. Selain itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan manusia Kabupaten Badung meliputi komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Badung di tahun 2021. Selain itu penulisan publikasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengkaji dan mengevaluasi kinerja pembangunan manusia Kabupaten Badung selama tahun 2021 berikut keterbandingannya (*comparation*) dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya.

Melalui publikasi ini diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan manusia dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas manusia, sehingga dapat mengambil kebijakan yang terbaik demi

kelangsungan pembangunan daerah Badung dalam kerangka pembangunan nasional di masa-masa mendatang.

1.3 Cakupan Publikasi

Dalam publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung 2021** ini tercakup kondisi beberapa aspek pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung selama tahun 2021 seperti aspek peluang hidup, pengetahuan, dan hidup layak.

1.4. Analisis dan Sumber Data

Analisis yang digunakan dalam publikasi ini bersifat deskriptif dengan komparatif data yang ada pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari BPS.

1.5. Sistematika Penulisan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dalam lima bagian, yakni:

1. **Pendahuluan**, berisi latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, cakupan pelaporan serta analisis, dan sumber data.
2. **Metodologi**, berisi uraian tentang cara penghitungan IPM dan masing-masing komponen pembentuk IPM.

3. **Analisis Komponen Pembentuk IPM**, berisi uraian tentang perkembangan komponen-komponen pembentuk IPM.
4. **Analisis Perkembangan IPM**, berisi uraian tentang perkembangan IPM selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Badung.
5. **Kesimpulan**, bagian ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis IPM di Kabupaten Badung.



Bab II

METODOLOGI

<https://balengkabps.go.id>

2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang dan berbagai faktor sosial ekonomi ikut memberikan andil di dalamnya. Proses pembangunan SDM ini merupakan interaksi berbagai komponen lintas sektor yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa perkembangan, sampai masa modern. Setiap tahapan pembangunan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang meliputi berbagai indikator/komponen sumber daya manusia dan ekonomi.

Untuk membandingkan tingkat perkembangan pembangunan manusia pada setiap daerah, setiap tahapan pembangunan atau setiap negara sejak lama telah diperkenalkan berbagai indikator pembanding. Indikator yang dikembangkan merupakan indikator gabungan (komposit) yang tersusun dari beberapa indikator tunggal. Pembentukan indikator komposit merupakan teknik pengukuran karakteristik sosial individu atau kelompok masyarakat yang secara teoritis telah didefinisikan tetapi sulit diukur dengan definisi operasional.

Morris D. Morris (1979) mengembangkan *Physical Quality Life Index* (PQLI) atau yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). Kemudian UNDP juga mengembangkan *Human Development Index* (HDI) yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia sejak dekade 1980-an telah dikenal beberapa indikator semacam ini seperti Indeks Mutu

Hidup (IMH), Indeks Kualitas Manusia Indonesia (IKMI), dan lain-lain.

Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan UNDP, IPM menjadi salah satu indikator pembangunan yang penting di Indonesia. Di tingkat internasional IPM dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. Laporan ini mengambil pola yang sama dengan publikasi UNDP yang berjudul "*Human Development Report*", terutama konsep dan definisi, serta metodologi yang digunakan. Untuk tingkat nasional, IPM dipergunakan sebagai tolok ukur antar provinsi, dan di tingkat provinsi, dipakai sebagai perbandingan antar kabupaten/kota.

Secara konseptual IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, provinsi, atau kabupaten/kota (UNDP, 1990; BPS, 1997).

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa IPM sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk

untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

2.2 Manfaat IPM

Manfaat pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

2.3 Metode Penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selama ini nilai IPM dihitung berdasarkan rata-rata sederhana dari tiga indeks yaitu indeks harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks hidup layak. Indeks pengetahuan/pendidikan didapat dari indeks melek huruf dan indeks lama sekolah. Indeks melek huruf yang dihitung dari angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur

pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Kedua alasan ini menjadi dasar perubahan penghitungan IPM dimana angka melek huruf sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan angka harapan lama sekolah.

Selain itu dalam penghitungan IPM metode yang baru, rata-rata sederhana (aritmetik) diganti dengan rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lainnya. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.1
Perkembangan Metodologi Penghitungan IPM



Tabel 2.1
Perbandingan Penghitungan IPM Metode Lama dan
Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	
	$IPM = \frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$		$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	

Dari hasil penghitungan di atas, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator dalam penyusunan IPM. Berikut nilai minimum dan maksimum indikator penyusun IPM.

Tabel 2.2
Nilai Maksimum dan Minimum Penghitungan IPM
Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin besar nilai tersebut berarti kualitas pembangunan manusianya semakin

baik. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

- a. $IPM < 60$: IPM rendah
- b. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- c. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- d. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

IPM yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia selama ini sebetulnya tidak sempurna seutuhnya. Banyak pihak yang menganggap pengukuran pembangunan manusia dengan menggunakan IPM ini kurang tepat. Basis ideologi dalam IPM yang bersifat egalitarian (kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin pemikiran terkait teknologi merupakan salah satu kritik untuk IPM. (BPS, 2017:10-11, Indeks Pembangunan Manusia 2016). Namun demikian sampai saat ini IPM masih digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah diimplementasikan pada keseluruhan penduduk di suatu wilayah.



Bab III

**ANALISIS
PEMBENTUK IPM**

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan harapan hidup yang dihitung berdasarkan usia harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah). Berikut perkembangan masing-masing komponen pembentuk IPM di Kabupaten Badung.

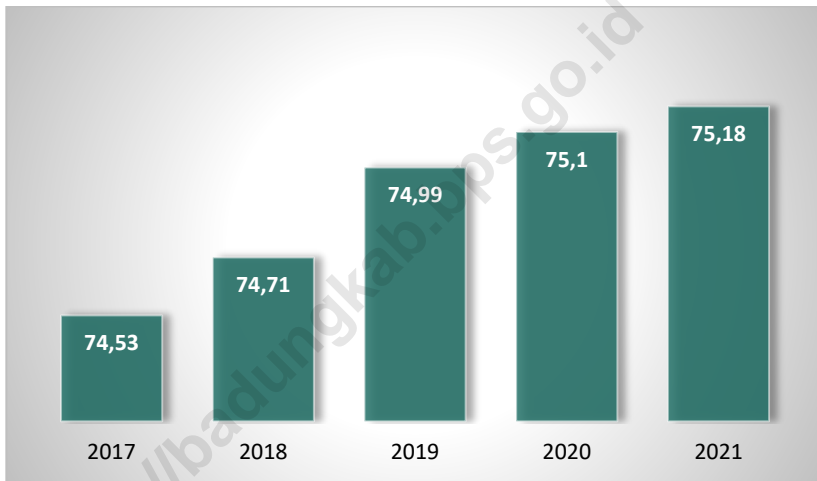
1. Peluang Hidup

Dalam berbagai analisis demografi, ukuran yang digunakan untuk mengukur peluang hidup adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Umur harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Umur harapan hidup adalah umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir.

Pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan umur harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi

penduduk dalam satu periode pada akhirnya akan berakibat pada penurunan umur harapan hidup.

Gambar 3.1.
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

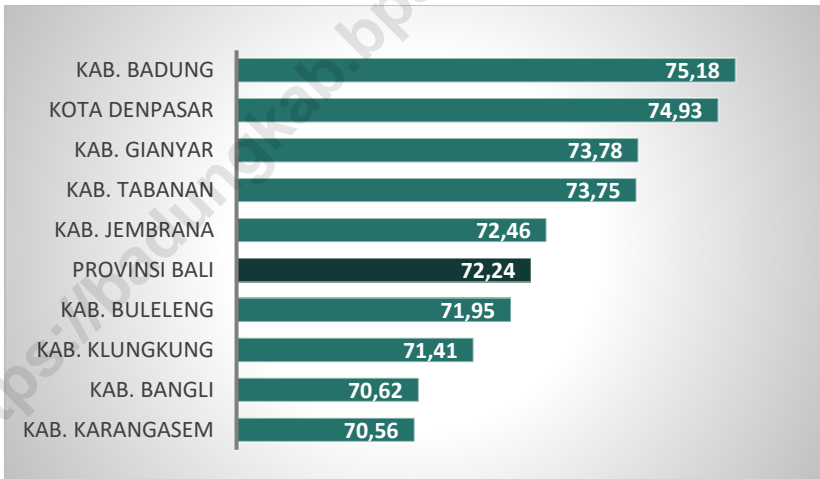


Sumber: BPS (diolah)

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, derajat kesehatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah peningkatan angka harapan hidup. Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Badung selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu dari 74,53 pada tahun 2017 menjadi 75,18 pada tahun 2021. Adanya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung relatif

membalik sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Kepedulian tinggi dari pemerintah Kabupaten Badung terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan bantuan jaminan kesehatan secara gratis, dapat meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Badung.

Gambar 3.2.
Umur Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Bali Tahun 2021



Sumber: BPS (diolah)

Jika dibandingkan dengan UHH wilayah lain di Provinsi Bali, UHH Kabupaten Badung berada pada posisi tertinggi di Bali. UHH Kabupaten Badung mencapai 75,18, melebihi UHH Provinsi Bali dan Kota Denpasar yang sebesar 72,44 dan 74,93. Capaian UHH Kabupaten Badung yang cenderung berada pada posisi tertinggi dari sembilan kabupaten/kota di Bali patut

dipertahankan. Lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lingkungan dan pola hidup sehat akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan tersebut dapat dilihat melalui angka morbiditas. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk karena semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak umur harapan hidup. Angka morbiditas penduduk Badung tahun 2021 adalah 5,81 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Badung semakin membaik dalam satu tahun terakhir.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Terdapat sekitar 0,41 persen rumah tangga di Kabupaten Badung yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,42 persen, artinya rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar di Kabupaten Badung semakin bertambah. Kemudian, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2021 adalah 100 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 99,31 persen.

Tabel 3.1.

Indikator Penunjang Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020-2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Angka Kesakitan	8	5,81
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Rawat Jalan	51,67	45,56
Rumah Tangga dengan air minum layak	99,31	100
Rumah tangga tidak memiliki fasilitas buang air besar	0,42	0,41
Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas Kesehatan	100	100
Persentase penduduk 0-59 bulan (balita) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	68,87	78,53

Sumber: BPS (diolah)

Faktor lain yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku sehat dan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator dari perilaku sehat adalah pemberian imunisasi pada balita secara lengkap. Pada tahun 2021 terdapat 78,53 persen balita di Kabupaten Badung yang mendapat imunisasi secara lengkap. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 68,87 persen. Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan di antaranya adalah siapa dan dimana penolong proses kelahiran dan penggunaan

jaminan kesehatan. Pada tahun 2021 seluruh wanita pernah kawin melakukan proses persalinan di fasilitas Kesehatan.

2. Pengetahuan

Dalam perkembangan suatu masyarakat, upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pendidikan. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, makin luas pengetahuan dan wawasan penduduk sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru terutama ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman.

Tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusia dilihat dari aspek pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

a. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak

pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Makin tinggi angka harapan lama sekolah maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 13,99 tahun. Artinya lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 13,99 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I/II. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan pendidikan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya kemajuan. Hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan lama sekolah dari 13,94 pada tahun 2017 menjadi 13,99 pada tahun 2021. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini tercermin dari adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan tetap menyiapkan anggaran untuk program pemerintah lainnya seperti pemberian

bantuan laptop bagi siswa sekolah sehingga dapat mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Tabel 3.2.

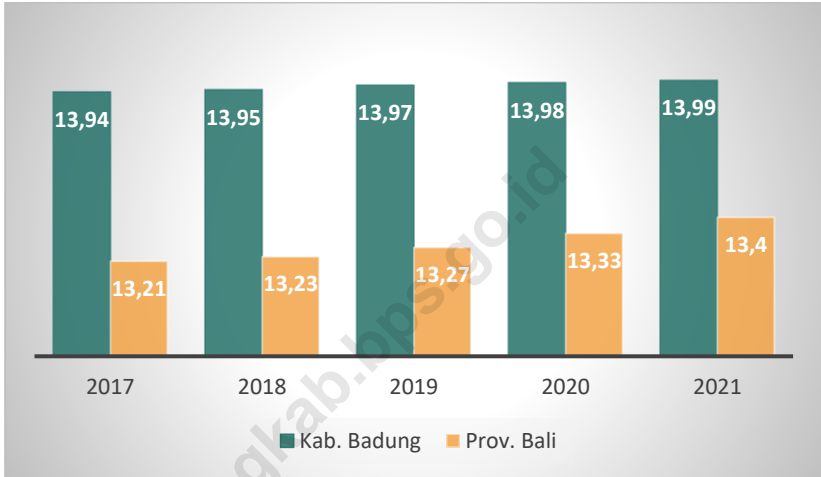
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2021 (persen)

Indikator	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
APS 7-12 tahun	99,86	99,97
APS 13-15 tahun	99,19	99,20
APS 16-18 tahun	91,27	90,79

Sumber: BPS (diolah)

Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2021 juga dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS). Nilai APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS dibedakan berdasarkan usia sekolah pada jenjang tertentu, yakni APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun, dan APS 19-24 tahun. APS 7-12 tahun Kabupaten Badung pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,11 persen (0,11 tahun) dari tahun 2020. APS 13-15 tahun juga mengalami peningkatan tapi tidak signifikan yakni sebesar 0,01 persen. Sementara APS 16-18 tahun cenderung mengalami penurunan dari 91,27 persen pada tahun 2020 menjadi 90,79 persen pada tahun 2021.

Gambar 3.3.
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung dan
Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS (diolah)

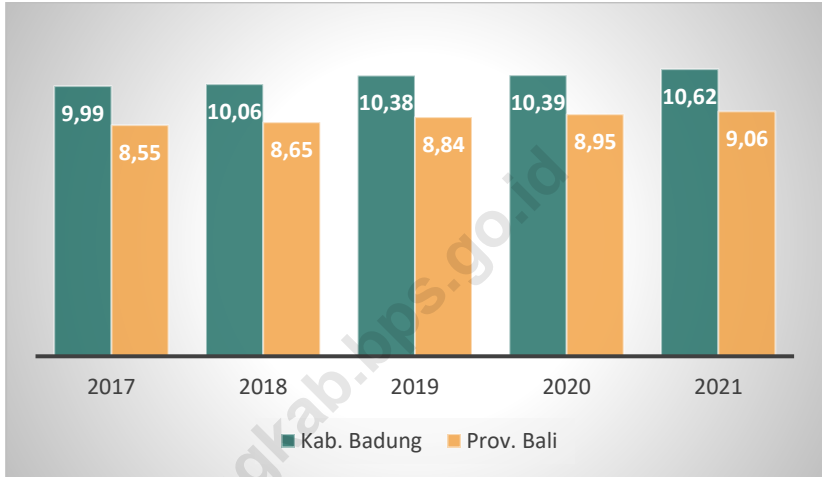
Sejalan dengan adanya peningkatan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Badung juga selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2017 sebesar 13,94 persen, lebih tinggi 0,73 poin jika dibandingkan dengan Provinsi Bali. Begitu pula pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah Kabupaten Badung pada tahun 2021 lebih tinggi 0,59 poin dibandingkan dengan Provinsi Bali.

b. Rata-rata lama sekolah

Sebagai bagian dari indikator pendidikan, lama sekolah bisa memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Semakin lama seorang bersekolah diasumsikan semakin baik kualitas orang tersebut. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan telah membawa hasil yang positif. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2017 adalah 9,99 tahun dan meningkat menjadi 10,62 tahun pada tahun 2021. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Badung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,62 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Selain rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2021 juga berada di atas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yang sebesar 9,06 tahun.

Gambar 3.4.
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Badung
dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS (diolah)

3. Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran IPM merepresentasikan aspek ekonomi yaitu standar kehidupan yang layak. Standar kehidupan yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi berikut pemerataannya. Kesejahteraan bisa dicerminkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa. Dalam prakteknya pengumpulan data pendapatan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu sebagai pendekatan digunakan data pengeluaran. Data pengeluaran

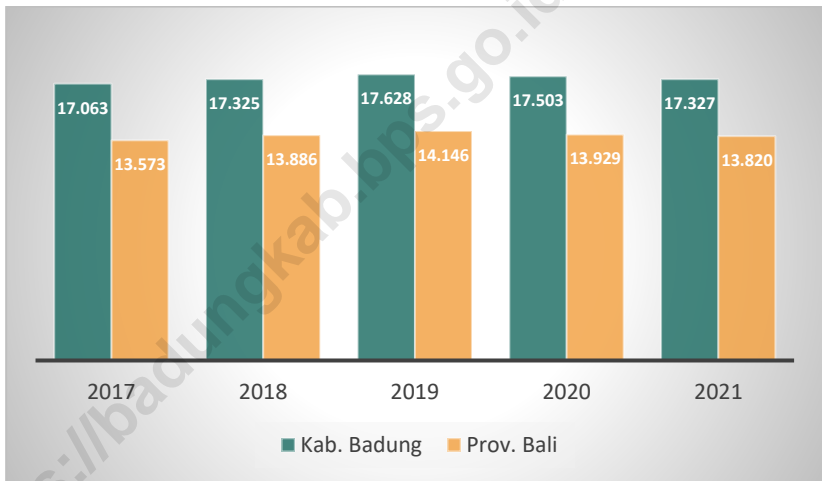
didapatkan dalam bentuk konsumsi makanan dan non makanan yang mencerminkan daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Daya beli masyarakat dalam penghitungan IPM didekati dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Sementara itu, penghitungan paritas daya beli pada penghitungan IPM menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli sendiri menggunakan Metode Rao.

Dalam kurun waktu 2017–2021 pengeluaran riil per kapita penduduk yang telah disesuaikan nampak berfluktuasi. Pada tahun 2017-2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk, tetapi sejak tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan. Menurunnya pengeluaran riil dapat disebabkan karena penurunan pendapatan. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi *Covid-19* yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kabupaten Badung sebesar 17,327 juta rupiah setahun. Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi Bali pada tahun yang sama yaitu 13,820 juta rupiah. Bahkan dari tahun 2017 hingga 2021, nampak jelas terlihat

kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Badung selalu berada di atas kemampuan daya beli penduduk rata-rata di Provinsi Bali.

Gambar 3.5.
Paritas Daya Beli Kabupaten Badung dan Provinsi Bali
Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah per kapita setahun)



Sumber: BPS (diolah)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP), cenderung dipengaruhi oleh status seseorang dalam kepemilikan pekerjaan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk bekerja sebesar 343.230 orang, mengalami penurunan sebesar 24.389 orang dibandingkan tahun sebelumnya (367.619 orang). Sementara angka TPT mencapai 6,92 persen, cenderung stagnan dari tahun 2020. Banyaknya pengangguran secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung.

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 18,5 ribu (2,62 persen), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,02 persen.

Tabel 3.3.
Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Tahun 2020-2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
TPT	6,92	6,92
Penduduk bekerja	367 619	343 230
Penduduk miskin	2,02	2,62
Jumlah penduduk miskin (ribu)	13,75	18,5

Sumber: BPS (diolah)



Bab IV

**ANALISIS
PERKEMBANGAN IPM**



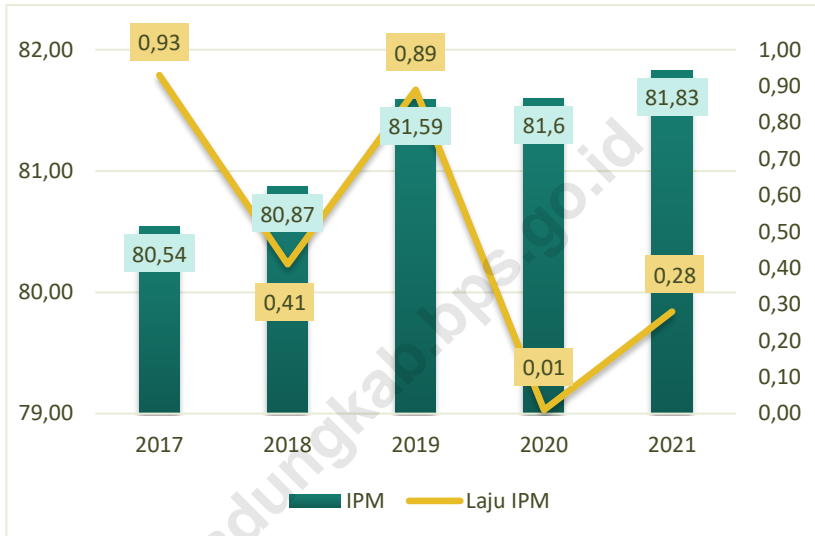
<https://madungka.bps.go.id>

Sebagai subyek dan objek pembangunan manusia merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan.

Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Badung. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Badung lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dari gambar di bawah terlihat bahwa IPM Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Badung mencapai 80,54 dan menjadi 81,83 pada tahun 2021. Hal ini berarti berbagai kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap peningkatan kualitas manusia. Tetapi walaupun IPM mengalami peningkatan

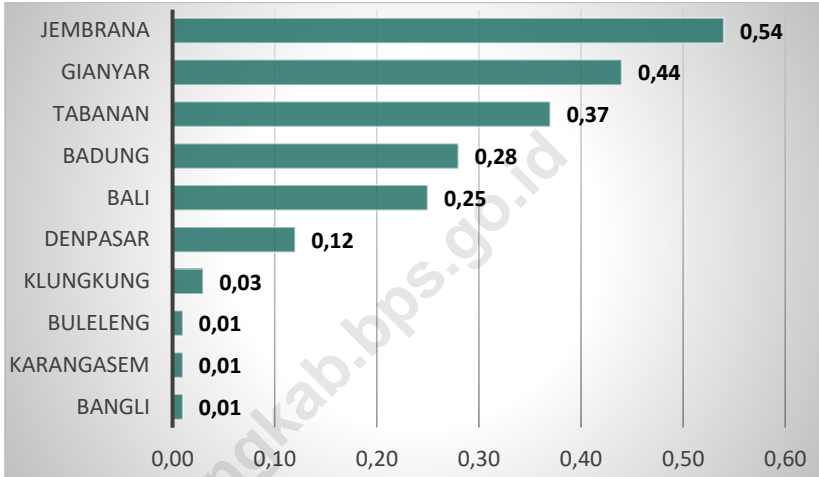
Gambar 4.1
Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan IPM
Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS (diolah)

dari tahun ke tahun, kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Badung selama periode 2017-2021 sangat fluktuatif. Meskipun demikian pencapaian IPM Kabupaten Badung sudah berada di atas IPM Provinsi Bali. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Badung untuk tetap fokus dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pembangunan manusia bagi masyarakatnya.

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BPS (diolah)

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu indikator, IPM dihitung salah satunya adalah untuk melihat keterbandingan antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi relatif pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pencapaian IPM Kabupaten Badung berhasil menduduki peringkat ke-2 di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar.

Selama periode 2017-2021, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan pencapaian IPM. Yang membedakan hanya kecepatan laju peningkatan IPM. Perbedaan kecepatan ini tentunya dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan peningkatan komponen-komponen di masing-masing kabupaten/kota. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik di

masing-masing wilayah kabupaten/kota seperti kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ketersediaan infrastruktur penunjangnya.

Tabel 4.1.

Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 dan 2021

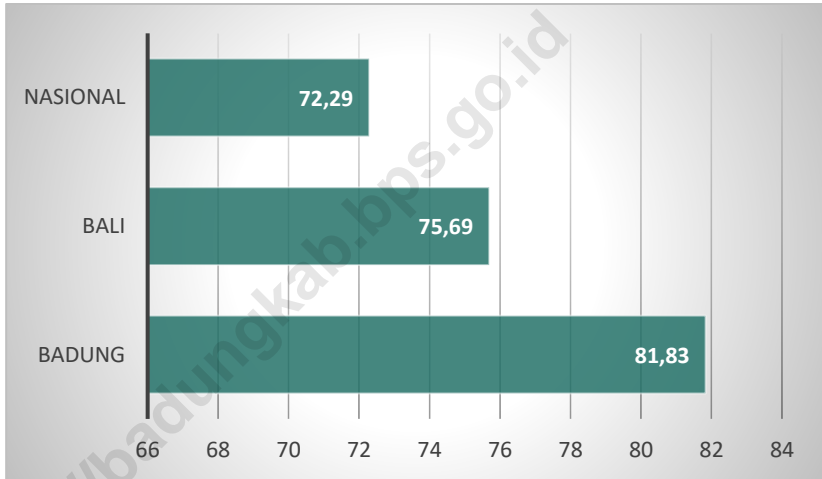
KABUPATEN/KOTA	Tahun		Peringkat	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Denpasar	83.93	84.03	1	1
Badung	81.60	81.83	2	2
Gianyar	77.36	77.70	3	3
Tabanan	76.17	76.45	4	4
Jembrana	72.36	72.75	6	5
Buleleng	72.55	72.56	5	6
Klungkung	71.73	71.75	7	7
Bangli	69.36	69.37	8	8
Karangasem	67.35	67.36	9	9
BALI	75.50	75.69	-	-

Sumber: BPS (diolah)

Apabila dibandingkan dengan IPM Bali dan Nasional, dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Badung berada di atas IPM Provinsi Bali dan IPM Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IPM Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Indonesia masing-masing sebesar 81,83, 75,69, dan 72,29. Angka ini menunjukkan bahwa derajat pembangunan manusia di

Kabupaten Badung sudah berada di atas rata-rata Provinsi Bali, dan rata-rata Nasional pada tahun 2021.

Gambar 4.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung,
Provinsi Bali, dan Indonesia Tahun 2021



Sumber: BPS (diolah)



Bab V

PENUTUP

<https://badungkab.bps.go.id>

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap selama ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang terutama bidang sosial dan ekonomi.

Hasil pembangunan bisa diamati melalui beberapa indikator dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat, dan lain-lain. Khusus untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, indikator yang relevan digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara sederhana IPM dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah secara spesifik sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja dari pemerintah suatu wilayah tersebut.

Dari tahun ke tahun IPM menunjukkan kecenderungan peningkatan. Di tahun 2021, IPM Kabupaten Badung mencapai 81,83. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Badung di peringkat ke-2 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Dilihat dari besaran laju pertumbuhan IPM diketahui bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Badung pada periode 2020-2021 mengalami percepatan.

IPM merupakan indeks komposit dari tiga variabel yaitu variabel peluang hidup yang diwakili oleh umur harapan hidup, variabel pengetahuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta variabel hidup layak yang

diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*purchasing power parity*). Pada tahun 2021 umur harapan hidup Kabupaten Badung tercatat sebesar 75,18, bahkan melebihi umur harapan hidup Provinsi Bali dan Kota Denpasar yang mencapai 72,44 dan 74,93 tahun. UHH Kabupaten Badung menempati peringkat pertama di Provinsi Bali. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 13,99 tahun. Bahkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2021 sebesar 10,62 tahun berada di atas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yang sebesar 9,06 tahun. Kemampuan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2021 mencapai 17,327 juta rupiah setahun. Hal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi Bali pada tahun yang sama yaitu 13,820 juta rupiah.



LAMPIRAN

<https://badungkab.bps.go.id>

Lampiran 1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	70,72	71,65	72,35	72,36	72,75
Tabanan	74,86	75,45	76,16	76,17	76,45
Badung	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83
Gianyar	76,09	76,71	77,14	77,36	77,70
Klungkung	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75
Bangli	68,24	68,96	69,35	69,36	69,37
Karangasem	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36
Buleleng	71,11	71,70	72,30	72,55	72,56
Denpasar	83,01	83,30	83,68	83,93	84,03
BALI	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69

Lampiran 2

Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	71,70	71,91	72,21	72,35	72,46
Tabanan	73,03	73,23	73,53	73,65	73,75
Badung	74,53	74,71	74,99	75,10	75,18
Gianyar	73,06	73,26	73,56	73,68	73,78
Klungkung	70,45	70,70	71,06	71,25	71,41
Bangli	69,83	70,05	70,37	70,52	70,62
Karangasem	69,85	70,05	70,35	70,47	70,56
Buleleng	71,14	71,36	71,68	71,83	71,95
Denpasar	74,17	74,38	74,68	74,82	74,93
BALI	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24

Lampiran 3

Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	12,40	12,61	12,63	12,65	12,92
Tabanan	12,95	12,96	12,99	13,00	13,01
Badung	13,94	13,95	13,97	13,98	13,99
Gianyar	13,37	13,71	13,80	13,89	13,97
Klungkung	12,94	12,95	12,98	12,99	13,00
Bangli	12,30	12,31	12,33	12,34	12,35
Karangasem	12,38	12,39	12,40	12,41	12,42
Buleleng	12,62	12,89	12,91	13,07	13,08
Denpasar	13,97	13,98	13,99	14,00	14,09
BALI	13,21	13,23	13,27	13,33	13,40

Lampiran 4

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	7,62	7,95	8,22	8,23	8,35
Tabanan	8,43	8,64	8,87	8,88	9,14
Badung	9,99	10,06	10,38	10,39	10,62
Gianyar	8,87	8,92	8,94	9,04	9,29
Klungkung	7,46	7,75	8,12	8,13	8,14
Bangli	6,80	7,13	7,16	7,17	7,18
Karangasem	5,52	5,97	6,31	6,32	6,33
Buleleng	7,03	7,04	7,08	7,24	7,25
Denpasar	11,15	11,16	11,23	11,47	11,48
BALI	8,55	8,65	8,84	8,95	9,06

Lampiran 5
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	11 468	11 666	11 902	11 790	11 675
Tabanan	13 923	14 245	14 608	14 494	14 326
Badung	17 063	17 325	17 628	17 503	17 327
Gianyar	14 222	14 376	14 623	14 544	14 391
Klungkung	11 005	11 318	11 484	11 376	11 287
Bangli	10 956	11 160	11 369	11 268	11 201
Karangasem	9 833	10 050	10 302	10 237	10 175
Buleleng	12 995	13 235	13 780	13 463	13 362
Denpasar	19 364	19 698	19 992	19 723	19 598
BALI	13 573	13 886	14 146	13 929	13 820

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG

Jl. Raya Darmasaba - Lukluk No. 28, Badung 80352
Telp: 8441616, Fax: 8441717, E-mail: bps5103@bps.go.id
Homepage: <http://badungkab.bps.go.id>

